

BAB V

PROSES POLITIK MODERN DI TINGKAT LOKAL

Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi. Pada saat yang sama ada pemahaman umum mengenai proses-proses terpenting dari kehidupan demokratis yang dapat diterapkan secara universal. Ada dua mazhab filsafat yang menerangkan dua konsep demokrasi lokal yang agak saling bertolak belakang. Mazhab pertama, yang sejarahnya dapat dikaitkan dengan filosof Perancis Jean Jacques Rousseau, memandang demokrasi sebagai *keterlibatan langsung warga masyarakat* dalam hampir semua urusan yang menyangkut kehidupan umum. Rousseau berkeyakinan bahwa peran serta seluruh warga masyarakat akan bisa mengungkapkan aspirasi umum mereka semua, dan bahwa cara terbaik untuk menentukan kehendak umum warga adalah melalui kekuasaan di tangan mayoritas. Namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa sistem dan bentuk pemerintahan lokal di masa sekarang sudah terlalu “besar” untuk mengakomodasi keterlibatan langsung warga masyarakat. Wujud demokrasi terbaik dan paling praktis yang bisa kita harapkan adalah demokrasi perwakilan, yang di dalamnya warga memilih calon wakil mereka atau partai politik yang membuat keputusan otoritatif bagi seluruh masyarakat. Banyak pihak yang berpendapat bahwa *demokrasi perwakilan* paling cocok diterapkan untuk demokrasi lokal.

Ada saja orang yang bertanya-tanya apakah mungkin di zaman modern ini gagasan demokrasi langsung bisa diwujudkan, padahal tema ini tidak habis-habisnya muncul di dalam polemik filsafat kontemporer, bahkan dalam praktik sehari-hari. Sebagai contoh, mantan Presiden Tanzania Julius Nyerere pernah mempopulerkan semacam gerakan sosialisme desa (*villagization*) dan *ujamaa* (komunitas) di negaranya. Pada 1967, dalam Deklarasi Arusha, Nyerere mencanangkan gagasan sosialisme desa yang berdasar atas hubungan kekerabatan, komunitas, kemandirian, gotong-royong, dan pembangunan lokal secara swasembada. Falsafah Nyerere membayangkan sebuah komunitas sosial dan ekonomi

yang di dalamnya orang-orang hidup berdampingan dan bekerja bahu-membahu demi kesejahteraan semuanya. Namun, Tanzania versi Nyerere itu 90 persen rakyatnya hidup di pedesaan.

Ukuran desa atau kota memang acap kali dituding sebagai faktor penghambat terwujudnya demokrasi langsung. Semakin besar sebuah kota, kian kecil kemungkinan di sana bisa diterapkan demokrasi langsung. Dalam bab selanjutnya akan melihat bagaimana para pengusul proses pengambilan keputusan “maya” berbasis Internet telah menghidupkan kembali gagasan demokrasi langsung itu, bahkan di dalam kondisi sosial era kini yang sangat kompleks

A. Politik Tingkat Lokal

Tidak ada satu pun alternatif yang dapat menggantikan pemilu sebagai cara melegitimasi tindakan para wakil rakyat dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Fungsi utama pemilu adalah melegitimasi kewenangan publik dan memberi mandat kepada pejabat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kampanyekampanye pemilu juga sangat banyak fungsinya, misalnya sebagai sarana klarifikasi berbagai isu dan kebijakan, forum pertanggungjawaban bagi calon, mengkomunikasikan informasi di antara para calon dan pemilih, dan menawarkan berbagai pilihan kepada khalayak perihal solusi bagi problem-problem yang dihadapi masyarakat.

Pemilu juga merupakan sarana penting dalam mempromosikan *akuntabilitas*. Akuntabilitas bukan semata-mata menyangkut kemampuan pemilih untuk mencopot pejabat yang gagal melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, namun juga mencakup peluang-peluang bagi para pejabat terpilih untuk memberikan keterangan. Selain selama proses pemilu, para pejabat terpilih juga dapat dimintai pertanggungjawaban melalui pemeriksaan eksternal, pada proses-proses audit dan lewat berbagai regulasi.

Keterkaitan antara pemilu dan akuntabilitas akan menjadi jelas jika kita perhatikan berbagai masalah yang kerap timbul manakala pejabat lokal lebih banyak ditunjuk ketimbang dipilih. Di Afrika, misalnya, banyak posisi lokal tidak diisi lewat pemilihan, melainkan lewat penunjukan dari pemerintah pusat (dengan atau tanpa berkonsultasi dengan masyarakat setempat). Seperti dijelaskan oleh

pakar ilmu politik dari Afrika, Dele Oluwu, ini sering diterjemahkan lewat sikap para anggota dewan kota atau daerah yang lebih memandang dirinya sebagai wakil pemerintah pusat, daripada wakil bagi warga yang mereka layani.

Isu penting yang menyangkut pemilu adalah *kepercayaan*. Para pemilih atau pemberi suara harus dapat mempercayai para pejabat terpilih agar yang bersangkutan dapat mewujudkan janji-janji mereka selama pemilu, serta yakin bahwa pejabat-pejabat itu dapat melaksanakan tugasnya dalam praktik pemerintahan yang terbuka dan bebas korupsi. Para kandidat harus pula yakin bahwa jika mereka kalah dalam pemilu kali ini, mereka akan mendapatkan kesempatan yang sama besar untuk memenangkan pemilu berikutnya (konsep pergantian kekuasaan). Masyarakat minoritas harus juga percaya bahwa meskipun mereka tidak memperoleh kursi mayoritas di dewan, sebagai contoh, kepentingan mereka tidak akan diabaikan dan mereka tidak akan dirugikan secara sistematis karena statusnya sebagai minoritas. Segenap tokoh di dalam pemilu lokal harus percaya bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung dengan bebas dan jujur, sehingga kehendak pemilihlah yang menjadi penentu hasil akhir. Dibanding dengan pemilu nasional, pemilu lokal dapat lebih menggairahkan dan semakin penting maknanya bagi kehidupan sehari-hari warga masyarakat.

Terdapat beberapa aktor dalam konteks pemilu lokal. Hal ini mengacu pada perbedaan tradisional di antara individu-individu yang mencalonkan diri untuk suatu jabatan, atau mereka yang memberikan suara bagi partai-partai politik yang telah mempersiapkan calon-calonnya untuk menduduki suatu jabatan (misalnya pada pemilu dengan sistem proporsional). Posisi yang diperebutkan melalui proses pemilu lokal itu sangat bervariasi, namun tokoh-tokoh pemilu lokal pada umumnya tidak banyak berubah: para kandidat yang mencalonkan diri sendiri atau bernaung di bawah partai politik; para pemilih yang mengisi kartu suara dan memasukkannya ke kotak-kotak suara; panitia pemilu yang bertugas menjaga keadilan prosedur pemilu, termasuk juga masalah-masalah keamanan dan kejujuran penghitungan suara; dan pers atau media yang melaporkan peristiwa-peristiwa kampanye serta hasilnya; para relawan partai politik dan aktor-aktor dari

masyarakat madani lain; dan para pemantau pemilu baik yang resmi maupun tidak resmi.

Pemilu lokal dilakukan untuk memilih pejabat yang akan menduduki forum-forum institusional. Forum-forum itu kerap diberi istilah berupa jabatan-jabatan eksekutif seperti walikota, administratur kota, *ombudsman*, hakim, petugas penegak hukum, dan sebagainya. Pemilu juga dapat dilaksanakan untuk memilih pejabat-pejabat legislatif, misalnya anggota dewan kota, dewan distrik, komite rukun tetangga, dan sejenisnya. Pertanyaan *apa* bisa juga menyangkut pengambilan keputusan publik mengenai isu-isu spesifik, misalnya proposal untuk mengajukan pinjaman publik, yang pelaksanaannya kerap disebut referendum atau hak inisiatif.

Pemilu lokal bisa dilaksanakan bersama-sama dengan yang di tingkat nasional, propinsi atau negara bagian, dan bisa juga dilaksanakan dengan jadwal tersendiri. Isu-isu yang terkait dengan *kapan* ini mencakup penetapan periodisasi pemilu, lamanya masa jabatan, apakah pemilu itu dilakukan bertahap atau sekaligus, serta panjangnya siklus pemilu (dalam satu hari atau beberapa minggu). Pentingnya pertanyaan *kapan* pemilu dilaksanakan adalah bahwa frekuensi dan penetapan jadwal pemungutan suara dapat mempengaruhi jumlah pemilih yang datang ke bilik suara secara signifikan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh sistem pemilu yang dipilih, namun ada aspek-aspek administratif lain yang berpengaruh. Berbagai inovasi dan isu terkini mengenai tata caranya telah memberikan berbagai alternatif bagi pemilih, apakah mereka akan memberikan suaranya lewat pos, secara *online*, dengan “antre” (berbaris di tempat umum di belakang tanda gambar kandidat atau lambang partai), atau secara rahasia (preferensi individu tidak diperlihatkan di tempat umum), serta metode referendum yang semakin populer di beberapa negara.

Pemilu lokal bisa memiliki berbagai keunggulan tertentu jika dibandingkan dengan pemilu nasional, termasuk di antaranya:

1. *Menjadi barometer tren politik nasional.* Pemilu lokal memiliki arti penting karena peranannya bagi kehidupan demokrasi nasional yang lebih

luas. Beberapa pemilu lokal terkini di Cina, Jepang, Jerman, Nigeria, dan Inggris menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu dapat dijadikan tolok ukur gejala politik nasional.

2. *Menunjukkan hal-hal terpenting bagi pemilih.* Kerap isu-isu yang menyebar pada pemilu lokal langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari para pemilih; kadang-kadang isu lokal bahkan merupakan persoalan terpenting bagi para pemilih. Karakter persaingan antar partai dan calon beserta isu-isu yang dimunculkan dapat menjadi indikator tentang masalah yang paling dipikirkan oleh pemilih.
3. *Proses demokratisasi.* Pemilu lokal dapat dijadikan batu pijakan menuju proses demokratisasi nasional yang menyeluruh, seperti yang terjadi pada pemilu lokal di Nigeria, tahun 1998.
4. *Melibatkan kaum minoritas.* Pemilu lokal bisa sangat besar manfaatnya karena memberi ruangan bagi kaum minoritas di tingkat nasional dalam kehidupan politik di arena lokal (lihat esei tentang India pada bab ini).
5. *Pembangunan sistem partai nasional.* Pemilu lokal juga memiliki korelasi yang agak rumit dengan sistem kepartaian dan pembentukan sistem partai tingkat nasional. Di Nigeria, misalnya, peraturan tentang pembentukan partai pada proses pemilu lokal pada 1998 telah sangat berpengaruh pada pembentukan sistem partai nasional di negeri itu.

Tanpa sistem pemilu lokal yang efektif, transisi menuju demokrasi tidak akan pernah berhasil sempurna. Pemilu lokal sangat penting artinya di negara-negara yang sedang, atau telah menjalani, transisi dari rezim otoriter ke dalam sistem politik yang lebih terbuka, sebab pemilu itu berlangsung di dalam konteks reformasi politik. Di negara-negara yang sedang mengembangkan demokrasi, pemilu lokal kerap memunculkan berbagai pertanyaan penting mengenai masalah *penjadwalan*. Pada beberapa kasus, pemilu lokal dilangsungkan sebelum demokrasi nasional diperkenalkan kepada rakyat (misalnya, kasus Nigeria pada 1998); pada kasus lain, pemilu lokal baru diadakan setelah pemerintah nasional yang baru telah terbentuk, seperti kasus Afrika Selatan pada 1995 dan Bosnia pada 1996. Memang tidak ada aturan pasti yang menentukan apakah pemilu lokal

harus dilakukan mendahului pemilu nasional, atau sebaliknya; setiap negara memiliki pengalaman dan pemikiran sendiri dalam menentukan jadwal pemilu mereka. Yang jelas, hasil-hasil pemilu lokal tidak terlalu menimbulkan risiko bagi pemerintah nasional yang sedang berkuasa, dan karenanya tidaklah mengejutkan bahwa upaya-upaya demokratisasi sering dilakukan secara bertahap di bawah kontrol yang ketat dari pusat.

Bagaimanapun penjadwalan pemilu yang akan dilakukan, jelas sudah bahwa tanpa sistem pemilu lokal yang efektif, transisi menuju ke demokratisasi tidak akan pernah sempurna atau mencukupi. Sebagai contoh, simaklah pemilu lokal pemerintah kotapraja yang dilakukan di Mozambique pada Juni 1998. Transisi total dari perang saudara menuju kehidupan demokratis yang penuh damai dianggap sebagai salah satu kisah sukses spektakuler setelah masa Perang Dingin. Dua pemilu nasional yang cukup berhasil terlaksana pada 1994 dan 1999, dan suasana keterbukaan disertai kompetisi politik yang bersemangat sangat terasa di negeri itu. Namun pada pemilu-pemilu lokal banyak muncul masalah. Di samping masalah tertib administrasi yang tidak seragam, terdapat masalah yang serius tentang jumlah pemilih yang datang ke bilik-bilik suara. Diperkirakan, rata-rata 85 persen pemilih dari total 33 wilayah administrasi di Mozambique tidak datang ke bilik-bilik suara karena adanya seruan partai oposisi utama, yakni Gerakan Perlawanan Mozambique atau RENAMO, untuk memboikot pemilu.

Meskipun hasil pemilu 1998 di Mozambique diakui oleh Mahkamah Agung dengan alasan tidak adanya peraturan yang membatalkan hasil-hasil pemilu karena rendahnya jumlah pemilih – legitimasi dari hasil pemilu lokal itu sangat diragukan. Kedalaman serta kualitas demokrasi pasca-masa transisi di Mozambique tidak bisa dikatakan sempurna lantaran kasus itu. Tugas besar yang dihadapi negara itu melanjutkan upaya untuk meningkatkan legitimasi dari pemerintah terpilih hasil pemilu-pemilu kotapraja berikutnya.

Pengalaman Mozambique menggarisbawahi kebenaran pernyataan tentang proses-proses demokratisasi. Transisi dari sistem politik tertutup ke dalam era keterbukaan pada hakikatnya adalah proses yang lama dan sulit. Pemilu nasional sangat penting artinya dalam memulai (seperti kasus Afrika Selatan) atau

menyempurnakan (seperti kasus Nigeria) proses panjang ini, namun itu belum cukup. Pemilu lokal memegang peranan penting dalam upaya demokratisasi, meskipun ada kenyataan bahwa hasil evaluasi para praktisi dan akademisi cenderung menyepelekan.

Pemilu lokal juga telah terbukti sangat penting dan bernilai di dalam sistem politik di mana kompetisi pada tingkat nasional sangat terkekang atau terisolasi oleh undang-undang atau dalam praktik. Sebagai ilustrasi, Jim Schiller mengatakan bahwa hampir dua pertiga pemilih di Indonesia tinggal di luar kota besar di desa atau kota kecil. Bagi kelompok itu, wajah pemerintah yang paling nyata adalah sosok kepala desa atau camat. Untuk mewujudkan demokrasi yang bermakna bagi mayoritas rakyat Indonesia, ketergantungan mereka terhadap pejabat harus dikurangi, dan kebebasan mereka untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi pemerintahan lokal harus ditingkatkan.

Contoh pemilihan-pemilihan tingkat desa di Cina juga mempertegas hal ini. Meskipun Partai Komunis Cina pada tingkat nasional memonopoli politik, ternyata masih tersisa ruang aktivitas berdemokrasi (yang sama sekali tidak berbasis partai) bagi warganya. Dengan demikian, pemilu lokal dapat menjadi aspek pengalaman berdemokrasi yang penting bagi penduduk negara yang iklim politiknya didominasi oleh sistem partai tunggal. Pengalaman-pengalaman berharga seperti itu dapat menyemaikan tunas bagi langkah-langkah demokratisasi di masa mendatang.

Evaluasi hasil pemilu juga menjadi bagian penting dalam demokrasi lokal. Pertanyaan paling mendasar tentu saja “apakah isu-isu yang paling menyentuh kehidupan masyarakat sudah diperdebatkan dan ditangani?”. Semakin besar keberhasilan masyarakat dalam mengatasi isu-isu penting di tingkat lokal, semakin besar pula sukses pemilu lokal; memang tidak semua isu (misalnya isu politik luar negeri) dapat diatasi di tingkat lokal, namun banyak isu lainnya (misalnya isu lingkungan lokal) yang dapat dibahas dan ditindaklanjuti. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat dipakai untuk menganalisis integritas pemilu lokal:

1. *Kehendak masyarakat.* Apakah pemilu itu dapat menunjukkan bahwa kehendak masyarakat telah terungkap dan pejabat pemerintah mengakui legitimasi kehendak itu?
2. *Kemungkinan adanya pergantian pemenang.* Apakah proses pemilu memungkinkan munculnya pemenang koalisi politik yang lain? Maksudnya, apakah partai oposisi memiliki peluang untuk menang?
3. *Membangun kepercayaan.* Apakah pemilu itu berhasil membangun kepercayaan terhadap sistem politik, yakni keyakinan masyarakat atau konstituen bahwa para pemuka politik atau pejabat terpilih akan melaksanakan mandat mereka untuk mewujudkan kepentingan umum?
4. *Pilihan terdidik.* Apakah pemilu lokal memberikan kesempatan kepada pemilih dan kandidat untuk mendefinisikan berbagai isu dan memilih solusi yang tepat bagi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat? Apakah pemilu lokal itu memberi pendidikan kepada warga masyarakat tentang isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat?
5. *Ajang permainan yang setara.* Apakah ajang politik di mana para kandidat dan partai politik itu bermain sudah setara? Maksudnya, adakah kondisi yang memungkinkan kandidat tertentu memperoleh kemenangan dengan cara lebih mudah?
6. *Mandat.* Apakah tujuan utama pemilu adalah untuk menimbulkan persetujuan, pilihan-pilihan pemenang-menguasai-segalanya di antara para calon dan partai-partai, atau apakah pemilu dirancang untuk menghasilkan wakil dari berbagai unsur populasi pemilih, menyerahkan penyelesaian isu-isu sensitif pada tawar-menawar di antara pejabat-pejabat itu

B. Sistem Pemilu Lokal

Para akademisi dan praktisi sama-sama sepakat bahwa struktur sistem pemilu sangat penting artinya dan menentukan karakter total dari kehidupan demokrasi itu sendiri. Opsi-opsi mengenai sistem pemilu itu banyak dibahas akhir-akhir ini sebagai salah satu peranti untuk “merekayasa” hasil-hasil pemilu, misalnya untuk menjamin kaum minoritas tidak akan tersisihkan dan tetap

mempunyai perwakilan dan pengaruh manakala politik “pemenang-menguasai-segalanya” timbul. Para pakar sepakat bahwa pemilihan sistem pemilu untuk menerjemahkan hasil perolehan suara ke dalam jabatan atau posisi di pemerintahan selalu diikuti oleh keputusan-keputusan penting – dan kadang-kadang kompromi – mengenai nilai-nilai tertentu, misalnya pemerintahan yang stabil, hasil pemilu yang jelas, perwakilan konstituen, akuntabilitas, hubungan dengan konstituen, signifikansi partai-partai politik, serta derajat pilihan terhadap partai atau calon tertentu.

Sistem pemilu juga dapat mempengaruhi arah dan perkembangan suatu sistem politik. Sistem pemilu yang akan memberikan kekuasaan dominan bagi pemenang mayoritas, misalnya, tentu akan melahirkan sistem politik yang diwarnai perseteruan antara pemerintah dan oposisi. Sebaliknya, bentuk-bentuk perwakilan proporsional sering dikatakan dapat menciptakan suasana politik yang akomodatif meskipun bisa menimbulkan fragmentasi pada sistem politik yang ada.

Pada pemilu lokal, isu-isu sistem pemilu sangat penting sebab sistem itu akan banyak menentukan peta politik lokal, serta cara-cara para pejabat terpilih menghadapi konstituen dari sub-distrik, rukun kampung, maupun dalam menangani masalah kemasyarakatan yang dominan. Di banyak pemerintah kotapraja yang berciri masyarakat plural seperti sekarang ini, masalah keanekaragaman etnis, agama, dan gender telah menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan sistem pemilu yang paling tepat. Pada berbagai konteks ada beberapa sistem yang mudah dirombak atau dikonversikan untuk mengembangkan perdamaian masyarakat setempat.

1. Memilih Sistem Pemilu yang Tepat

Pada beberapa kasus, pemerintah lokal berhak memilih sistem pemilu sendiri, sementara ada juga sistem pemilu yang telah diatur oleh undang-undang. Memilih sistem pemilu yang baik tidaklah berbeda dari merancang desain yang tepat untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul dari keadaan lokal. Menentukan pilihan sering sangat sulit, sebab melibatkan bermacam-macam keputusan tentang cara mengatasi berbagai kompromi, misalnya representasi bagi

seluruh lapisan masyarakat yang kemungkinan besar akan melahirkan pemerintahan koalisi yang rapuh dan memaksimalkan nilai-nilai seperti menjalin hubungan baik dengan konstituen, kemudahan untuk saling memahami, melibatkan kelompok masyarakat tertentu, persaingan politik, proporsionalitas, akuntabilitas, identitas kandidat, serta pembentukan aliansi antar kekuatan politik yang saling berebut pengaruh.

Memilih sistem pemilu juga menuntut dilakukannya tawar-menawar mengenai tujuan, makna, dan bentuk pemilu yang akan dilaksanakan. Keputusan yang diambil bisa mengandung keputusan serius yang mempengaruhi masyarakat, terutama dalam keputusan untuk memilih sistem pemilu yang bernuansa persaingan (misalnya memilih calon dari sekian banyak calon yang posisinya saling berseberangan atau berlawanan) atau sistem demokrasi yang lebih kolaboratif, misalnya dalam pemilihan wakil-wakil untuk duduk di forum pengambilan konsensus seperti dewan kota. Namun, yang jelas, mereformasi peraturan pemilu adalah hal yang sangat sulit, karena melibatkan pilihan-pilihan mendasar bagi sebuah masyarakat politik.

Di Italia, misalnya, dilakukan perombakan sistem pemilu pada 1999 yang memungkinkan dilakukannya pemilihan presiden regional secara langsung (di negara itu terdapat 20 presiden lokal, 5 di antaranya berstatus khusus). Di daerah, 80 persen kursi dewan diperebutkan oleh mereka yang tercantum di dalam daftar calon tingkat propinsi dengan sistem perwakilan proporsional. Sisanya yang 20 persen dialokasikan bagi para calon yang tercantum di dalam daftar calon tingkat regional yang mempunyai jumlah pemilih terbanyak. Nama-nama awal pada daftar partai adalah calon kandidat presiden *giunta* (daerah), dan partai yang memperoleh suara terbanyak akan mempunyai presiden. Untuk pertama kalinya, pada April 2000, para pemilih secara langsung memberikan suara untuk memilih calon presiden pada pemilu yang dilaksanakan serentak di seluruh negara.

2. Opsi-Opsi Utama Sistem Pemilu

Tiga tipe utama sistem pemilu adalah sistem pluralitas-mayoritas, sistem semiproporsional, atau sistem proporsional. Unsur-unsur dari sistem-sistem ini juga dapat dikombinasikan, dan karenanya banyak sekali variasi opsi sistem

pemilu yang dapat diterapkan untuk pemerintahan perkotaan. Ada tiga elemen utama yang akan kita bahas di sini:

- a. *Formula pemilihan*, yang mendefinisikan metode mentransfer suara menjadi
- b. kursi-kursi di dewan;
- c. *Struktur pemungutan suara*, atau cara menampilkan calon atau partai di kertas suara atau di dalam metode pemungutan suara yang lain; dan,
- d. *Besarnya distrik/daerah pemilihan*, atau banyaknya jumlah kandidat yang dipilih dari suatu distrik (prinsip umumnya, semakin besar distriknya, semakin besar pola tingkat proporsionalitasnya).

Sedangkan sistem-sistem pemilu yang terpenting adalah sebagai berikut:

Sistem Pluralitas atau Mayoritas. Sistem pluralitas atau sistem mayoritas dapat digunakan untuk memilih pejabat eksekutif (walikota atau jabatan-jabatan sejenis) atau anggota legislatif (dewan kota atau setara dengan anggota DPRD) dan pemegang jabatan-jabatan lainnya.

Sistem "First-past-the post." Sistem ini merupakan sistem paling sederhana untuk menetapkan calon tunggal di sebuah distrik. Calon (bukan partai) yang paling banyak memperoleh suara akan memperoleh kursi; ini belum tentu berarti calon yang bersangkutan akan memenangkan suara mayoritas.

Sistem dua putaran atau "run-off". Jika pada pemungutan suara putaran pertama tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas, akan dilakukan satu lagi putaran penentuan (*run-off*) untuk menentukan pemenang utama dari dua (atau mungkin lebih) calon terkuat. Siapa pun yang nantinya memperoleh suara terbesar pada putaran kedua itu akan dinyatakan sebagai calon terpilih, tanpa mempedulikan yang bersangkutan memperoleh dukungan mayoritas atau tidak.

Sistem "block vote". Sistem ini digunakan pada distrik pemilihan yang memiliki banyak wakil; dan memberi keleluasaan kepada para pemilih untuk memberikan lebih dari satu suara, sesuai dengan jumlah calon atau kursi yang ada. Pemungutan suaranya dilakukan untuk memilih calon atau partai. Metode penghitungan suaranya sama dengan metode yang berlaku pada sistem *first past-*

the-post, di mana calon yang memperoleh suara terbanyak akan dinyatakan memperoleh kursi.

Sistem "alternative vote". Sistem ini digunakan pada distrik dengan satu wakil dan mengharuskan para pemilih menuliskan urutan calon-calon pilihan mereka mulai dari urutan ke satu, kedua, dan seterusnya di kertas suara yang tersedia. Calon yang mendapatkan suara urutan pertama lebih dari 50 persen dinyatakan sebagai calon pemenang. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak sebagai calon urutan pertama, pemungutan suara diulang sampai muncul calon yang memperoleh kemenangan mayoritas.

Sistem Semi-Proporsional atau Sistem Campuran

Sistem paralel. Pada sistem ini, sistem perwakilan proporsional dikombinasikan dengan sistem pluralitas-mayoritas, namun kedua sistem ini dijalankan secara paralel, dan kursi-kursi yang dimenangkan melalui sistem proporsional ini tidak dapat mengkompensasi variasi proporsi perbandingan jumlah suara dengan kursi yang tersedia yang disebabkan oleh pemilihan calon-calon pada distrik beranggota tunggal.

Sistem "single non-transferable vote". Sistem ini sebenarnya adalah kombinasi antara sistem *first-past-the-post* dan distrik beranggota banyak, di mana para pemilih hanya memberi satu suara. Dengan demikian, satu, dua, atau tiga kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan muncul sebagai calon terpilih.

Sistem Perwakilan Proporsional. Di dalam sistem ini jumlah suara kurang lebih sebanding dengan jumlah kursi yang tersedia (misalnya untuk kursi dewan kota).

Sistem daftar. Sistem ini memungkinkan masing-masing partai membuat dan menunjukkan daftar calon mereka kepada para pemilih yang pada hari pemilu akan memberikan suara untuk partai pilihannya. Partai-partai akan mendapatkan kursi yang jumlahnya sebanding dengan jumlah suara yang mereka rebut. Calon anggota dewan atau pejabat terpilih akan ditetapkan dari daftar yang dimiliki partai. Sistem daftar ini bisa bersifat tertutup (atau "tetap", di mana nama calon yang sudah ada di dalam daftar tidak bisa diubah) atau terbuka (para pemilih

bisa menentukan urutan prioritas calon pilihan mereka sesuai yang tertera di daftar). Pada beberapa kasus, partai-partai dapat menggabungkan daftar calon mereka itu lewat mekanisme yang disebut *apparentement* (kesepakatan yang dibuat partai-partai, biasanya yang sama-sama memiliki basis lokal atau regional, untuk menggabungkan hasil perolehan suara mereka).

Sistem “mixed member proportional”. Dalam sistem ini, sebagian kursi dewan (biasanya setengah) diseleksi dengan menggunakan metode mayoritaspluralitas, kemudian sisa kursi lainnya ditentukan lewat metode daftar. Kursi-kursi yang diperoleh lewat metode daftar digunakan untuk mengkompensasi ketidakseimbangan yang timbul dari sistem lainnya, sehingga lewat penghitungan suara umum nanti akan dihasilkan komposisi kursi dewan yang proporsional.

Sistem “single transferable vote”. Sistem ini bersifat preferensial dan digunakan pada distrik-distrik beranggota banyak. Untuk memenangkan pemilu, para calon harus melampaui kuota tertentu dari suara yang menempatkan mereka sebagai calon di urutan pertama. Preferensi para pemilih itu kemudian ditransferkan kepada calon lainnya, jika ada calon yang tidak lolos kuota (karena minimnya perolehan suara yang dia dapatkan) atau ada calon yang memperoleh surplus suara. Hasil yang diperoleh dari sistem ini adalah komposisi dewan yang proporsional, di mana para pejabat atau anggota legislatif terpilih memiliki hubungan langsung dengan konstituen-konstituen tertentu.

Di antara beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sistem pemilu untuk pemerintah lokal adalah pengaruh penting dari faktor geografis dan personalitas, serta kecenderungan munculnya calon-calon independen, yakni tokoh-tokoh pilihan khalayak yang tidak terikat pada satu distrik pemilihan, yang kadang-kadang dipilih bersama-sama dengan calon lain yang berbasis konstituen.

Geografi dan ruang. Distrik dan batas-batas wilayahnya sangat penting artinya bagi demokrasi lokal. Aspek dimensi geografis menjadi penting karena berbagai isu yang diputuskan di tingkat lokal tentunya isu yang menyentuh kehidupan sehari-hari, misalnya penyediaan layanan publik, keamanan kampung, identitas wilayah (karakter suatu rukun kampung yang ditandai oleh faktor-faktor etnis, agama, kebudayaan, dan ras), pembangunan ekonomi, transportasi,

sekolah, dan sebagainya. Sewajarnya bila orang sangat mengenali daerah tempat tinggal mereka, dan mereka memiliki kepentingan yang sama dengan orang-orang lain yang sama-sama tinggal di suatu bagian kota.

Karena alasan inilah, banyak sistem pemilu lokal yang membagi-bagi batas wilayah distrik pemilihan ke dalam sebuah sistem *ward* (distrik kecil), rukun kampung, atau sub-wilayah (*sub-municipal*). Sistem ini sangat menguntungkan, antara lain berupa terjaminnya keterwakilan konstituen, namun juga bisa membawa masalah, manakala kaum minoritas yang tinggal di dalam batas-batas distrik itu tidak terwakili sepenuhnya. Langkah pembatasan wilayah pemilihan atau pendistrikan itu banyak membawa manfaat selain juga masalah.

Salah satu solusinya adalah prinsip “jeruji roda”, di mana pembatasan wilayah pemilihan atau distrik tidak hanya didasarkan atas kelompok komunitas, namun berdasarkan segmen dari lingkaran yang ditetapkan dari titik pusat kota. Maksudnya, pembagian distrik itu dilakukan dengan cara seolah-olah membagi kota itu ke dalam beberapa potongan yang sama besar (mirip orang membelahbelah kue). Opsi ini memungkinkan terciptanya distrik-distrik yang di dalamnya tercakup komunitas-komunitas kota dan pinggiran kota (*suburban*) serta campuran dari berbagai kelas masyarakat dan kelompok etnis; sistem pembagian distrik seperti ini mengesampingkan aspek-aspek batas wilayah kota (dari segi etnis atau demografis) atau ciri geografis.

Kepribadian. Karena pejabat lokal biasanya sangat dikenal oleh pemilih – dan kerap dipilih karena faktor kepribadian mereka – dan karena masyarakat kota sering mempercayakan mandat mereka kepada seorang tokoh eksekutif yang kuat, jelaslah bahwa peranan sosok individu dan kepribadiannya sangat penting dalam politik lokal. Orientasi yang kuat pada faktor kepribadian atau individu ini cenderung memberlakukan sistem mayoritas di dalam memilih pejabat eksekutif, dan tidak jarang terpaksa menempuh mekanisme putaran kedua (*run-off*) jika pada putaran pemilihan pertama belum ada calon yang memperoleh suara terbanyak.

Kepadatan perwakilan. Besar-kecilnya distrik adalah faktor penting. Seperti ditulis oleh John Stewart: *Pemerintah lokal berpotensi mencapai suatu skala keterwakilan konstituen yang secara kualitatif sangat berbeda dari*

keterwakilan di tingkat nasional... Keterwakilan itu harus dibangun atas dasar hubungan yang terjalin terus-menerus antara para dewan kota dan segenap konstituen yang mereka wakili. Semakin kuat partisipasi warga masyarakat di dalam proses-proses pemerintahan, maka kian kuat pula keterwakilan mereka.

Meskipun belum ada panduan umum yang mengatur hal ini, sesungguhnya faktor penting yang perlu dikaji adalah jumlah anggota dewan sebagai rasio dari jumlah penduduk yang sudah berhak memilih di suatu distrik pemilihan. Sistem sistem pemerintahan lokal memiliki peluang untuk memperkecil rasio itu (memberikan perwakilan lebih besar kepada lebih sedikit rakyat). Maksudnya, keterwakilan itu akan dipertinggi jika distriknya lebih kecil.

Opsi-opsi PR dan calon “bebas”. Aspek penting lain dari pemilihan sistem pemilu lokal adalah maraknya penggunaan sistem keterwakilan proporsional (*proportional representation* atau PR) pada sebuah wilayah kotapraja. Pada kasus yang demikian, digunakan sistem keterwakilan proporsional daftar tunggal (berbasis partai) untuk mencerminkan (secara proporsional) berbagai pendapat politik. Pemilihan sistem pemilu seperti ini cukup kondusif untuk membentuk dewan daerah yang luas cakupan perwakilannya, dan meniadakan perlunya pendistrikkan sub-wilayah. Salah satu masalah yang ditimbulkannya adalah sistem ini memiliki kecenderungan lebih menguntungkan partai dan mengorbankan calon perorangan atau wakil-wakil dari organisasi massa setempat yang tidak memiliki basis partai.

Mekanisme lain yang banyak digunakan adalah dengan memilih calon-calon “bebas” yang tidak terikat distrik sub-wilayah tertentu. Manakala calon-calon itu terpilih, hasil pemilu yang lebih proporsional bisa diperoleh dengan memodifikasi beberapa peraturan pemilihan. Dengan demikian, suatu derajat proporsionalitas tertentu dapat dicapai melalui komposisi kursi dewan yang berisi anggota-anggota dari kandidat bebas itu, sembari tetap mempertahankan orientasi utama dari sistem pemilu yang berlaku, yakni perwakilan berbasis konstituen.

Referendum dan inisiatif pemungutan suara. Referendum dapat memberi kesempatan bagi pemilih untuk secara langsung menyatakan pilihannya

menyangkut kebijakan-kebijakan yang penting, namun juga mengandung beberapa risiko potensial.

Salah satu metode yang menanjak popularitasnya adalah referendum yang diadakan untuk memutuskan berbagai isu yang menyebabkan perselisihan. Pada sebuah referendum, isu publik yang tidak dapat diselesaikan tanpa secara langsung menanyakan kehendak rakyat akan ditindaklanjuti ke dalam suatu jajak pendapat yang berisi serangkaian pertanyaan. Para pemilih diminta menjawab “ya” atau “tidak” pada sejumlah pertanyaan, dan pada umumnya hasilnya akan ditetapkan berdasar perolehan suara yang mencapai 50 persen atau lebih, meskipun ada beberapa isu yang memerlukan suara “mayoritas super”, misalnya dua pertiga atau 67 persen suara yang menyatakan menerima atau menolak suatu proposal.

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipikirkan sebelum menyelenggarakan referendum yang dimaksudkan untuk menenentukan sikap mengenai suatu kebijakan publik adalah:

1. Tepatkah isu yang bersangkutan diputuskan secara langsung oleh rakyat?
2. Apakah rakyat cukup berminat untuk menjawab pertanyaan yang disodorkan kepada mereka?
3. Bagaimana cara melaksanakan referendum itu atau memasukkannya ke kertas suara?
4. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang tepat?
5. Seberapa intensifkah silang pendapat mengenai isu itu?
6. Apakah konsekuensi yang akan timbul dari jawaban “ya” atau “tidak” itu kelak?
7. Bagaimanakah peraturan yang menetapkan pendapat akhir (berapakah jumlah suara minimal atau maksimal yang akan menentukan berhasil atau gagalnya referendum)?
8. Apakah masyarakat perlu dididik atau diberi informasi tentang berbagai dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan oleh isu itu?

Inisiatif warga masyarakat telah banyak mendesak pemerintah untuk mengadakan referendum untuk menyelesaikan berbagai isu, misalnya masalah

perburuan binatang, aborsi, transportasi, perpajakan, dan pelayanan kesehatan, terutama di Amerika Serikat. Pada Januari 1999, Mahkamah Agung Amerika Serikat diminta memberi fatwa mengenai validitas metode-metode referendum ini ketika pemerintah Negara Bagian Colorado menyatakan bahwa inisiatif seperti ini perlu dikontrol dengan ketat. Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa membatasi inisiatif referendum merupakan pelanggaran hak-hak konstitusi yang menyangkut kebebasan berbicara.

Kadang-kadang isu di dalam referendum berkembang lebih besar daripada pertanyaan spesifik yang disodorkan kepada pemilih, dengan munculnya, misalnya, pertanyaan seputar kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang berkuasa. Inilah salah satu hasil interpretasi dari kekalahan pada referendum November 1999 di Portugal, mengenai rencana pembagian kekuasaan ke daerah. Rencana pemerintah mengusulkan negara Portugal dibagi ke dalam delapan daerah, dengan harapan bahwa kekuasaan yang dilimpahkan kepada daerah-daerah itu nanti akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pedesaan yang terpencil. Dalam rencana itu diusulkan untuk membentuk dewan-dewan regional dan memberi ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan ekonomi. Para penentang rencana itu berargumentasi bahwa langkah itu akan mengancam kesatuan nasional, membawa inkonsistensi dalam hal kebijakan ekonomi, dan munculnya lapisan-lapisan administrasi pemerintahan yang tidak perlu. Dalam referendum itu, 63 persen pemilih menolak rencana itu.

Karena pendidikan kepada publik merupakan aspek penting proses referendum, beberapa negara dan pemerintah daerah bahkan menyewa jasa konsultan kampanye untuk melobi masyarakat agar mendukung isu-isu yang akan diajukan di kartu suara, melaksanakan kampanye yang mendorong warga untuk menolak atau menerima isu referendum. Kian maraknya praktik penggunaan konsultan membuat banyak pihak berpendapat bahwa referendum bisa berubah menjadi antidemokratis jika sejumlah besar dana dipertaruhkan, dan konsultan digunakan untuk memanipulasi proses politik dan mempengaruhi pemilih. Ada juga pihak yang mengatakan bahwa konsultan-konsultan itu memiliki perananan penting dalam kehidupan demokrasi, sehingga setiap usaha membatasi ruang

gerak mereka atau melarang penggunaan jasa mereka akan sama saja dengan melanggar kebebasan berbicara, berserikat, dan melakukan advokasi.

Mengembangkan Partai Politik di Daerah. Pengembangan demokrasi di dalam partai-partai politik adalah tantangan utama bagi semua negara penganut demokrasi. Pemilihan sistem pemilu bisa berdampak pada pertumbuhan partai-partai politik lokal, hubungan mereka dengan partai-partai nasional, dan terhadap praktik demokrasi internal dari struktur partai-partai lokal. Di dalam sistem pluralitas mayoritas, pengujian kualitas setiap individu calon oleh publik sangat penting artinya; sistem daftar keterwakilan proporsional menuntut partai politik lebih seksama dan hati-hati dalam menyeleksi calon. Karena alasan inilah banyak pihak menggarisbawahi pentingnya praktik-praktik demokratis internal di dalam partai politik sebagai salah satu cara meningkatkan mutu demokrasi perwakilan. Namun ternyata banyak negara atau pemerintah daerah tidak mau mengembangkan partai politik lokal. Alasan mereka, pembentukan partai politik lokal pada tahapan ini justru dapat menghancurkan perkembangan demokrasi lokal. Di Kanada, misalnya, partai-partai politik lokal hanya bermunculan di kotakota yang jumlah penduduknya lebih dari 20.000 jiwa. Kandidat-kandidat yang mencalonkan diri untuk suatu jabatan bersaing sebagai individu, bukan atas dasar afiliasi dengan partai tertentu. Sistem demokrasi lokal bebas partai seperti ini memiliki kelebihan tersendiri: kandidat yang memenangkan pemilihan bebas berbicara mewakili seluruh masyarakat, tokoh-tokoh walikota dari berbagai kota dapat menjalin kerjasama tanpa label kepartaian, dan kandidat yang paling sanggup memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh suara terbanyak.

Kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan partai politik di bawah pemerintahan kotapraja yang demokrasinya sudah mapan tentu berbeda dengan yang terjadi di dalam kondisi pemerintahan pasca-transisi atau pasca-perang. Pada sistem demokrasi yang mapan, afiliasi atau ketergantungan pada loyalitas pemilih sangat kuat, jaringan kerja organisasi partai sangat mantap, dan kepemimpinan politik intern partai lebih stabil dan kohesif. Dalam kondisi seperti ini, sangat kecil terjadi kemungkinan perubahan yang drastis. Namun, stabilitas sistem partai

juga memiliki sisi buruk; partai-partai lokal yang stabil dan mantap cenderung lamban mengantisipasi perubahan dan tantangan yang muncul di berbagai daerah.

Di negara-negara yang sedang mengalami transisi, perkembangan partai politik masih belum mapan, dan banyak diwarnai oleh muncul dan bubar nya partai-partai baru yang kerap hanya mengandalkan seorang tokoh kharismatik. Di negara-negara pasca-perang, perkembangan partai politik sering mencerminkan perpecahan masyarakat yang diakibatkan oleh perang, dan besarkecilnya kemungkinan terjadinya rekonsiliasi nasional pun kerap dipengaruhi oleh percaturan politik intern partai. Contoh paling mutakhir dari pentingnya pengaruh kondisi politik intern partai pada tingkat lokal adalah kondisi hubungan intern di partai-partai Irlandia Utara yang mendukung penyatuan dengan Kerajaan Inggris (*Unionist*) dan di dalam faksi-faksi nasionalis (yang anti-Inggris dan mendukung untuk bergabung dengan Republik Irlandia). Di dalam partai Ulster Unionist yang dipimpin David Trimble, terjadi perdebatan sengit antara kubu moderat dan kubu konservatif menyangkut jadi atau tidaknya dilaksanakan *Good Friday Agreement* (Kesepakatan Hari Isa Almasih) yang mengatur masalah otonomi daerah.

Hasil pemilihan dengan kemenangan tipis pada November 1999 menetapkan bahwa partai itu setuju bergabung dengan dewan yang baru dibentuk. Pada saat yang sama, berbagai perdebatan seru yang terjadi di dalam Sinn Fein sering menetapkan pendapat partai-partai nasionalis dalam berbagai perundingan dan tahapan implementasi kesepakatan damai.

Isu penting yang banyak muncul di berbagai daerah kotapraja adalah apakah partai-partai politik dan perserikatan sejenis (terutama asosiasi-asosiasi masyarakat madani dan kelompok-kelompok yang didanai masyarakat) memiliki hak untuk menolak atau mengecualikan seseorang. Isu-isu itu memang sarat konflik mengingat partai-partai politik dan forum perwakilan masyarakat itu demikian penting artinya dalam mendefinisikan suatu masyarakat politik dan menetapkan bagaimana jalannya pemerintahan bagi komunitas yang bersangkutan.

Perkembangan Partai Lokal. Membina demokrasi di dalam partai-partai politik merupakan tantangan berat, baik bagi masyarakat demokratis yang telah mapan maupun yang masih dalam fase transisi, dan dalam berbagai situasi apa pun di seluruh dunia, selalu ada tantangan nyata dalam usaha-usaha mengembangkan struktur partai lokal yang efektif. Jaringan-jaringan kerja yang mencoba menyalurkan kepentingannya ke tingkat yang lebih tinggi – terbentuknya koalisi di kalangan orang-orang yang memiliki kesamaan visi, misalnya – bisa saja disalahgunakan untuk menciptakan jaringan-jaringan yang menampilkan perilaku anti-demokrasi seperti nepotisme dan korupsi. Berbagai macam manuver dan perjanjian-perjanjian politik dalam pembentukan koalisi kerap mendorong partai-partai politik menyusun agenda dan berbagai kepentingan yang sempit dan picik, yang mengkhianati amanat masyarakat yang (menurut klaim mereka) mereka wakili. Isu penting dalam mengembangkan partai politik lokal adalah tata cara atau metode rekrutmen aktivis dan anggota partai, serta tingkat serta sifat pengorganisasian masyarakat akar rumput.

Pengucilan terhadap kelompok yang secara tradisional tidak memiliki perwakilan juga merupakan isu hangat di berbagai tempat. Kadang-kadang solusinya adalah tanggung jawab partai politik untuk menjamin bahwa seluruh kandidat yang dimilikinya telah merefleksikan komposisi masyarakat konstituen. Di India, misalnya, sudah ada undang-undang yang menetapkan sepertiga jatah jabatan *panchat* (pemerintah daerah) harus dipegang oleh perempuan. Perubahan ukum ini merupakan revolusi bagi partai-partai politik dalam kaitannya dengan tata cara mereka mencari, menominasikan, dan mempromosikan calon-calonnya, sekaligus menetapkan hubungan antara masing-masing kandidat dan jabatan yang akan diembannya. Banyak yang mengatakan perubahan-perubahan itu telah berpengaruh terhadap agenda dan kebijakan partai, dengan penitikberatan pada isu-isu yang khususnya merupakan perhatian kaum perempuan, misalnya soal kesehatan, sanitasi, atau gizi.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah masalah pendanaan kegiatan kampanye, uang kebutuhan anggota, dan pengaruh uang dalam politik. Selama uang berpengaruh besar terhadap sepak terjang partai dan posisi kandidat, akan

terjadi pembusukan terhadap semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, baik si kaya maupun si miskin. Isu-isu nyata perihal akses ke dalam sistem politik akan mengemuka manakala uang sudah memainkan peranan jahatnya di dalam perkembangan partai politik dan mewarnai hubungan partai itu dengan seluruh institusi pemilihan umum. Karena itu, transparansi dan kejujuran merupakan unsur penting dalam pendanaan kampanye.

Berbagai keprihatinan tentang jual beli pengaruh dan *money politics* telah mendorong banyak pihak memusatkan perhatian pada tata cara mendorong tumbuhnya demokrasi dari tingkat yang paling rendah, hingga ke tata cara meningkatkan pengaruh partai politik lokal terhadap lapisan-lapisan pemerintahan yang lebih atas. Sebagai contoh, di Eropa banyak organisasi politik lokal yang mempunyai andil penting dan langsung dalam proses seleksi terhadap anggota-anggota Parlemen Eropa.

Demokrasi di dalam Partai. Prosedur-prosedur yang demokratis perlu ditanamkan ke dalam tingkat organisasi politik yang paling rendah, supaya sistem demokrasi yang benar-benar utuh dapat terwujud, dan ini berarti bahwa langkah itu harus dimulai dari tingkat kantor pimpinan cabang (partai yang bersangkutan). Lagi-lagi, dalam kasus ini ada serangkaian pertanyaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi seberapa demokratiskah kondisi sebuah organisasi politik lokal. Rangkaian pertanyaan itu hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi beberapa isu pokok yang perlu dibahas dalam sebuah organisasi politik yang tengah berusaha meningkatkan prosedur-prosedur demokratis internalnya agar lebih praktis – dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan berikut jangan dianggap sebagai satu-satunya resep mujarab untuk meningkatkan demokrasi intern partai.

Perhatian besar dari masyarakat dunia terhadap peranan uang dalam politik demokratis menunjukkan perlunya dicari langkah-langkah inovatif untuk memulihkan kepercayaan dan peran serta masyarakat dalam demokrasi dan mendorong mereka agar dapat secara langsung menyuarakan pendapatnya. Di dalam praktiknya, melibatkan segenap warga masyarakat ke dalam suatu kancah politik besar (misalnya di kota-kota besar) sangatlah sulit; terlalu banyak suara yang harus didengar. Salah satu jalan keluarnya adalah melakukan desentralisasi

lebih jauh dengan membentuk lembaga-lembaga demokrasi sub-wilayah; cara yang lain barangkali adalah dengan menyempurnakan sistem pemilu dan memperkuat demokrasi internal di dalam partai-partai politik. Opsi yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat di luar metode tradisional yang ada – maksudnya, mencari metode-metode inovatif selain pemungutan suara.